

Kepentingan Jepang Dalam Kerja sama Pertahanan dan Keamanan dengan Australia (2020-2022)

Fathia Kinarya¹, Feyza Raharsh Lumintosari²

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Karawang
E-mail: 2010631260054@student.unsika.ac.id

² Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Karawang
E-mail: 2010631260055@student.unsika.ac.id

Abstract: Australia dan Jepang merupakan sahabat dekat yang memiliki ikatan Kerjasama seperti yang dikatakan oleh PM Abbott bahwa Jepang merupakan sahabat terbaik Australia di Asia dan ingin terus membangun kerja sama yang lebih kuat. Sejak China, sebagai negara yang berpengaruh di Asia, mulai menunjukkan kebangkitan dan pengaruhnya di Asia selama beberapa tahun terakhir membuat Jepang kian mempererat gandengannya dengan Australia. Perjanjian Australia dengan Jepang secara eksplisit mendukung PM Abe untuk merevisi pola pertahanan Jepang dan menambah keterlibatan dalam isu-isu keamanan regional meskipun pada akhirnya hal tersebut akan menyinggung perasaan China. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan bilateral di antara kedua negara dengan tujuan dapat menguatkan hubungan politik dan diplomasi antar kedua negara. Penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan Jepang di dalam Kerjasama pertahanan dengan Australia. Dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, metode kualitatif sendiri meliputi pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data digunakan dengan studi Pustaka dan kemudian data tersebut di analisis secara deskriptif.

Keywords: *Asia Pacific, Japan, Australia, Defense Cooperation*

PENDAHULUAN

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh AS, membawa kependudukan Jepang pada tahun 1945 sampai Jepang memperoleh kembali kedaulatannya pada tahun 1952, dengan ditandatanganinya Perjanjian Damai San Francisco. Sekutu berusaha melumpuhkan

kekuatan Jepang dengan melakukan demiliterisasi, yang merupakan penghapusan kekuatan militer Jepang. Namun terlepas dari ini AS memberikan jaminan perlindungan terhadap pertahanan dan keamanan Jepang. Dari sinilah kebijakan pertahanan dan kapabilitas militer Jepang telah mengalami

perkembangan dan pergeseran yang cukup spesifik dan menjadi lebih aktif apalagi setelah berakhirnya perang dingin. Jepang memperluas misi SDF (*self defense force*) dengan melakukan aksi kemanusiaan di bawah PBB, bantuan bencana hingga aktif bekerja sama dengan negara lain seperti halnya dengan Jepang yang memperkuat hubungan pertahanan dan keamanan dengan Australia. (Mahesa, 2019) Jepang dan Australia merupakan negara sahabat yang memiliki ikatan kerjasama yang kuat sekaligus bersama-sama mengembangkan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. Australia dan juga Selandia Baru merupakan partner yang amat penting bagi Jepang tidak hanya dalam bidang ekonomi namun juga politik. Kerja sama untuk mengembangkan dan melancarkan prinsip demokrasi di Asia Pasifik serta mempromosikan pengembangan dan stabilitas kawasan merupakan isu yang amat fundamental yang diemban oleh Jepang dan Australia. Meskipun spekulasi media menyatakan hubungan Jepang dan Australia kini berubah dari aliansi kuasi menjadi aliansi formal, hal ini tidak sepenuhnya benar karena perubahan menjadi aliansi formal sangat tidak disarankan sehubungan dengan aliansi Australia dengan China dan batasan konstitusional dalam pola pertahanan Jepang. Australia dan Jepang memiliki ikatan kerjasama yang sangat kuat serta bersama-sama mengembangkan demokrasi di kawasan Asia Pasifik. (Media Indonesia, 2018) Hubungan erat mereka terjadi karena adanya kedekatan satu sama lain dengan negara Amerika Serikat. Sejak negara China menjadi negara yang mempunyai pengaruh terbesar di Asia, Jepang semakin mempererat hubungannya dengan Australia. Hubungan bilateral antara Australia

dengan Jepang secara luas dianggap sebagai prioritas kebijakan luar negerinya selama 1980 sampai 1990-an. Kerja sama pertahanan yang dijalankan Jepang dan Australia sebagai "mitra strategis alami". Dalam kerjasama keamanannya ini diperkuat dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan yaitu isu nuklir Korea Utara, saat melakukan uji coba rudal yang ditembakkan dari Korea Utara melintasi batas wilayah Jepang dan menimbulkan kekhawatiran dan trauma yang muncul oleh karena itu hubungan kerjasama dengan Australia ini ada sangkut pautnya dengan Jepang yang memperkuat ketahanan keamanannya dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara. (Kompas.com, 2022). Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana Jepang dan Australia bekerjasama dalam bidang pertahanan keamanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian serta kajian mengenai Kepentingan Jepang Dalam Kerjasama Pertahanan dan Keamanan dengan Australia cukup banyak dilakukan dalam konteks dan landasan yang beragam. Hal ini bersamaan dengan Jepang sebagai salah satu negara maju dan punya pengaruh besar di dunia, mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan negaranya. Berbagai publikasi baik buku, jurnal dan karya ilmiah telah dibuat guna melihat dan membuktikan bagaimana cara Jepang dalam mengurus pertahanan dan keamanan negaranya, tinjauan pustaka ini sendiri akan melihat bagaimana sumber sumber valid dalam membuktikan bagaimana Jepang

menangani hal tersebut. Dalam suatu penelitian senantiasa dibutuhkan sejumlah dukungan yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang dimaksud harus berkaitan dengan penelitian yang tengah dilakukan saat ini.

Tinjauan pustaka pertama adalah sebuah artikel berjudul "Menakar Kekuatan Politik Australia – Jepang: Studi Kerjasama Bilateral Bidang Ekonomi dan Pertahanan" yang ditulis oleh Amanda Nabilla Nuryadin pada tahun 2020. Pada artikel ini penulis membahas mengenai kekuatan hubungan politik antara Australia dan Jepang yang mana dilihat dari hubungan kerjasama yang telah mereka lakukan selama ini. Komunitas pertahanan Jepang sebagian besar menyambut kerjasama pertahanan yang lebih erat dengan Australia. Penelitian mengenai koalisi pertahanan dan keamanan Jepang – Australia tidak banyak dilakukan. Oleh karena itu tulisan ini bisa dikembangkan dengan lebih komprehensif untuk mengisi gap literatur yang ada. tulisan ini lebih menyorot pada aliansi Jepang dengan Australia dalam penguatan hubungan pertahanan dan keamanan dan bagaimana kepentingan Jepang dalam aliansinya dengan Australia.

Tinjauan pustaka kedua ini merupakan sebuah karya ilmiah yang berjudul "Dilema Aliansi Amerika Serikat Terkait Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang" oleh Epica Mustika Putro pada tahun 2012. Penulis meneliti bagaimana peningkatan aliansi militer Jepang dengan Amerika Serikat di bawah batasan konstitusi Jepang. Setelah Perang Dunia ke-2, kekalahan Jepang membuat Jepang tidak memiliki pertahanan yang cukup untuk melindungi negaranya. Di bawah Perjanjian San Fransisco, Amerika Serikat

melakukan kerja sama keamanan dengan Jepang. Dengan segala dinamika konflik hubungan internasional yang ada, Amerika Serikat dan Jepang meningkatkan aliansi keamanannya. Hal ini dilakukan Amerika Serikat karena adanya ketakutan akan terjebak (*entrapped*) dalam konflik Jepang dengan musuhmusuhnya. Ketakutan tersebut muncul karena tingginya faktor konflik khususnya ketika Amerika Serikat harus terlibat konflik dengan Tiongkok maupun Korea Utara. Melalui peningkatan kekuatan militer Jepang, Jepang dapat mengurangi beban Amerika Serikat. Dengan demikian, hubungan dalam aliansi tersebut lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat karena telah mengurangi resiko *entrapped* bagi Amerika Serikat dengan melalui teori dilema aliansi oleh Glenn H. Snyder penulis ingin mengetahui keputusan Amerika Serikat dalam aliansi tersebut. Dalam hal ini, peningkatan kerja sama keamanan antara Amerika Serikat dengan Jepang disebabkan oleh dilema dalam aliansi yang menyebabkan Amerika Serikat dalam posisi tidak ingin terjebak (*entrapped*) ke dalam konflik regional yang melibatkan mitra aliansinya yaitu Jepang.

Tinjauan yang ketiga merupakan penelitian yang berjudul "Kerjasama Jepang-Australia dalam Menjaga Keamanan Energi Jepang Pasca Insiden Fukushima (Periode 2011-2014)". Penelitian tersebut ditulis oleh Dina Rifqiana pada tahun 2015. Penelitian ini mendiskusikan tentang fenomena kerjasama yang terjadi antara Jepang dan Australia selama periode 2011-2014, dimana fokus diskusi terbagi dalam 3 bahasan:

Pertama, proses berjalannya kerjasama antara Jepang dan Australia terutama dalam bidang energi, dimana Jepang sangat bergantung pada pasokan energi Australia terutama setelah terjadinya insiden Fukuhsima- kebocoran reaktor nuklir di prefektur Fukushima. Insiden Fukushima yang terjadi sebagai akibat dari adanya bencana gempa bumi dan tsunami pada 11 Maret 2011 telah menyebabkan Jepang kehilangan pasokan energinya. Hal ini didasari oleh penutupan energi nuklir di seluruh negeri Jepang terkait dengan keselamatan masyarakat. Dengan penutupan reaktor nuklir di Jepang dan di tempat lain, menyebabkan adanya perubahan yang signifikan dalam struktur permintaan energi dengan bahan bakar fosil terutama LNG dan batubara. Kedua, integrasi ekonomi yang terbentuk antara Jepang dan Australia akibat arus ekonomi yang semakin tinggi di kedua negara terutama dalam bidang energi. Ketiga, hambatan yang dihadapi oleh Jepang dalam menjalin kerjasama dengan Australia demi menjaga keamanan energi negerinya. Dan hasil yang ditemukan oleh penulis adalah, pertama, kerjasama ini menekankan pada ekspor dan impor bahan bakar fosil terutama LNG dan batubara. Kedua komoditas ini menjadi komoditas yang paling dibutuhkan oleh Jepang untuk dapat memenuhi kebutuhan energinya setelah terjadinya bencana. Kedua, kerjasama ini membawa hubungan kedua negara ke arah yang lebih baik yang dengan adanya integrasi ekonomi melalui Japan-Australia Economic Partnership Agreement (JAPEPA), yang merupakan perkembangan sejarah dalam hubungan ekonomi Australia dengan Jepang. Ketiga, terdapat hambatan yang muncul dalam kerjasama ini baik itu hambatan internal maupun hambatan eksternal Jepang. Hambatan internal yang menjadi kendala

dalam kerjasama ini adalah lain penurunan swasembada energi, meningkatnya emisi CO₂, ekonomi Jepang menurun akibat impor bahan bakar fosil yang besar dan adanya perdebatan mengenai rencana energi Jepang. Sedangkan hambatan eksternalnya adalah kehadiran China yang menjadi pesaing bagi Jepang dalam hubungannya dengan Australia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, metode kualitatif sendiri meliputi pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data digunakan dengan studi Pustaka dan kemudian data tersebut di analisis secara deskriptif. Metode yang digunakan relevan dengan penulisan artikel ini karena artikel ini membahas mengenai Kepentingan Jepang Dalam Kerjasama Pertahanan dan Keamanan dengan Australia dan sumber data yang didapat merupakan sumber sekunder, seperti artikel Jurnal, buku dan surat kabar yang validasinya terpercaya dan kemudian data yang diperoleh dianalisa kemudian dibuat penarikan kesimpulan. Metode penelitian Kualitatif secara umum memiliki dua tujuan, yaitu untuk menggambarkan dan menggambarkan serta menjelaskan. Metode Kualitatif ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai 'apa, bagaimana dan mengapa' dari adanya sebuah fenomena daripada mempertanyakan 'berapa banyak'. Ciri dari metode ini adalah memiliki sumber data, sumber data tersebut bisa berupa dari data sekunder maupun primer yang didapatkan dari dokumen – dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika pertahanan dan keamanan Jepang

Pasca kekalahan Jepang pada perang dunia ke II membuat kebijakan pertahanan nasional Jepang didasarkan pada Perjanjian 1960 mengenai Kerjasama dan Keamanan dengan Amerika Serikat, dimana keamanan Jepang dipegang oleh dua pihak yakni untuk keamanan internal dipegang oleh Jepang, sedangkan keamanan nasional yang kemungkinan mendapatkan serangan dari pihak luar dibantu oleh pasukan militer Amerika Serikat, sekutu menganggap dengan begini diharapkan Jepang tidak lagi menjadi negara yang agresif. Perjanjian penyerahan diri atas kekalahan Jepang pada sekutu dalam perang tertulis dalam postdam declaration (26 Juli 1945) serta aliansi keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat tertulis dalam *The US-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security* yang diratifikasi pada tahun 1951 dan berlaku sejak April 1952. Oleh karenanya, Jepang harus menerima kenyataan bahwa kekuatan militer yang dibanggakan dulu harus dilucuti oleh pasukan sekutu yang sebagian besar terdiri dari tentara-tentara Amerika Serikat, Jepang juga harus tunduk kepada sistem Amerika Serikat dan juga harus mengakui Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat Douglas Mac Arthur sebagai komandan tertinggi kekutatan sekutu Pasifik (Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani, 2015).

Pada artikel pasal 9 “Konstitusi Perdamaian” memberikan hak kepada Jepang dalam mempertahankan dukungan pemerintah dan warga negara dengan mengizinkan Jepang membentuk *Self Defense Force* (SDF) dengan syarat pasukan tersebut tidak memiliki senjata nuklir maupun senjata ofensif lainnya

atau ditempatkan di luar dari wilayah Jepang. Meskipun *Self Defense Force* yang dimiliki oleh Jepang dibatasi peran dan kemampuannya, namun pada tahun 1976 konstitusi diperbaharui sehingga *Self Defense Force* ini berfokus kepada pengembangan kekuatan yang memadai untuk menghadapi potensial musuh daerah. Mulai tahun 1976, kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa *Self Defense Force* akan dikembangkan untuk mengatasi invasi skala kecil sedangkan untuk masalah serangan yang lebih serius, Jepang tetap akan bergantung kepada Amerika Serikat (Amril, 2005). *Self Defense Force* sendiri berada dibawah kendali *Civilian Defense Agency* milik Jepang, yang berada dibawah naungan Perdana Menteri. Meskipun sangat terlatih dalam melakukan misi terbatas mereka, *Self Defense Force* ini cenderung kecil, kekurangan SDM, dan kekurangan bantuan untuk melakukan operasi militer yang lebih luas. Dalam dunia internasional Jepang juga ikut terlibat dalam penataan keamanan internasional walaupun keterlibatan menyeluruhnya diwakili oleh Amerika Serikat. Sejauh ini keterlibatan Jepang secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan yang menekankan pendekatan-pendekatan kepentingan dalam sektor ekonomi. Jepang menggunakan kekuatannya sebagai alat untuk menjalin adanya hubungan ataupun kerjasama dengan negara-negara lain dengan memberikan bantuan ekonomi (Irawan, Rizki, & Zulkarnain, 2021).

Walaupun keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan negara Jepang ini menimbulkan pro dan kontra, Jepang tetap beraliansi hingga sekarang

dengan Amerika Serikat hal ini dibuktikan dengan perpanjangan aliansi keamanan yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013, dimana perpanjangan aliansi ini membahas tentang partisipasi Jepang dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan dunia internasional. Perdana Menteri Itsunori Onodera yang menjabat pada saat itu beserta Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel mengadakan pertemuan pada 3 Oktober 2013, pertemuan ini dilakukan dalam rangka memperpanjang aliansi untuk memastikan keamanan Jepang sekaligus stabilitas keamanan di kawasan, selain itu kelanjutan aliansi ini juga membahas tentang penataan kembali tentara Amerika Serikat di Jepang dan merevisi Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat 1997.

Kebijakan ini bertahan hingga pada saat pasca perang dingin Jepang merubah kebijakan pertahanan keamanannya terlebih lagi tatanan internasional yang potensi ancamannya semakin meningkat yang dapat membahayakan keamanan nasional Jepang, perubahan kebijakan ini ditandai dengan pembuatan NDPO (*National Defense Program Outline*) pada tahun 1996 sebagai loncatan pertama perubahan kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang Dingin (H, 2014). Dalam NDPO 1996 ini menyebutkan peran pertahanan Jepang di kawasan pasca Perang Dingin, yang juga berisi tentang kerjasama Jepang dan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman seperti kemungkinan adanya aktivitas agresi militer, baik terhadap Jepang maupun negara lain di luar negara Jepang yang dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan. Lalu pada tahun 2004, kabinet Jepang meratifikasi *National Defense Program Guidelines* (NDPG) sebagai sebuah kebijakan baru

pertahanan Jepang yang kemudian mulai dijalankan pada awal tahun 2005, kemudian di tahun 2006 Jepang membentuk *Defense Posture Review Board* di dalam *Japan Defense Agency* (JDA) yang berisi rangkaian untuk membahas kapabilitas pertahanan Jepang sekaligus mencermati potensi ancaman terutama di kawasan Asia Pasifik, penyesuaian besar dalam NDPG 2005 ini menunjukkan adanya penentuan tujuan dari kebijakan keamanan Jepang yang memiliki dua tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk mencegah ancaman apapun yang secara langsung mencapai Jepang dengan mengusir atau meminimalisir kerusakan yang terjadi dan mengurangi kesempatan munculnya ancaman apapun di belahan dunia sebagai upaya untuk mencegah hal tersebut mencapai Jepang (Ministry Of Defense, 2016). Tujuan pertama yang coba diraih Jepang adalah melalui peningkatan kemampuan pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai sebuah bentuk strategi untuk keamanan nasional Jepang.

Memasuki masa kepemimpinan Shinzo Abe Jepang mengalami perubahan yang signifikan karena pada masa kepemimpinan ini Perdana Menteri Shinzo Abe mengusulkan untuk membentuk Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status *Japan Defense Agency* atau JDA yang akhirnya disetujui oleh Amerika Serikat dan diwujudkan pada 9 Januari 2007 menjadi Departemen Pertahanan Jepang dari Badan Pertahanan Jepang.

Hal ini juga merujuk dari konstitusi yang mengikat Jepang dimana Jepang dilarang untuk memiliki kekuatan militer sendiri dan hanya diperbolehkan memiliki pasukan

bela diri untuk pertahanan negara dari serangan musuh. Pasukan Jepang ini juga tidak boleh terlibat dalam sengketa internasional. Perdana Menteri Shinzo Abe memfokuskan perubahan kebijakan ini dalam upaya untuk meningkatkan status Badan Pertahanan Jepang menjadi sebuah kementerian penuh yang kemudian, pada Desember 2006 Parlemen Jepang menyetujui hal ini tanpa adanya pihak oposisi dalam pembentukan kebijakan. Kementerian Pertahanan ini juga diberi wewenang untuk menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan yang menunjang bagi Jepang.

Saat ini Jepang dipimpin oleh Fumio Kishida yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang menggantikan Shinzo Abe yang wafat, dalam siaran pers nya Kishida berencana merombak kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang yang sudah berjalan selama puluhan tahun, Kishida berencana untuk meningkatkan anggaran belanja hingga dua persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2027. Hal ini akan menjadikan Jepang memiliki anggaran yang sama dengan negara-negara anggota aliansi NATO. Peningkatan anggaran ini disebut untuk mendanai proyek-proyek membangun kapasitas serangan balik, yaitu kemampuan untuk melacak dengan satelit dan menembak lokasi peluncuran pada target yang mengancam negara, hal ini dilakukan karena dinamika kekuatan militer global semakin berkembang terlebih lagi isu yang masih hangat di perbincangkan yakni invasi Rusia ke Ukraina hingga semakin kuat nya pengaruh China di kawasan.

Awal mula kerjasama Jepang-Australia

Perubahan Geografis yang baru-baru ini terjadi di Asia Pasifik telah

membuat hubungan keamanan Jepang-Australia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kedua negara ini memiliki sejarah kerja sama yang panjang dalam konteks multilateral seperti misi pemeliharaan perdamaian atau pembangunan lembaga regional, tetapi baru-baru ini telah diperkuat dengan melakukan lebih banyak kerja sama pertahanan bilateral dan trilateral langsung, seperti dengan Amerika Serikat. Sejak 2007, latihan militer bilateral dan trilateral telah dilakukan secara teratur dan mencakup operasi tempur, perang antikapal selam, dan manuver taktis. Ada juga peningkatan pembagian informasi bilateral dan kerja sama dalam teknologi pertahanan, ruang angkasa, dan dunia maya. pemerintah Australia dan para pemimpin bisnis melihat Jepang sebagai pasar ekspor vital dan elemen penting dalam pertumbuhan dan kemakmuran Australia di masa depan di kawasan Asia-Pasifik. Jepang telah menganggap Australia sebagai mitra penting, sumber energi, mineral, dan produk utama lainnya yang andal, tujuan wisata populer, saluran yang berguna ke Barat, dan satu-satunya kekuatan ekonomi tingkat menengah lainnya di Asia-Pasifik. Australia dan Jepang sama-sama telah mengakui satu sama lain sebagai mitra strategis utama di Asia-Pasifik. Dengan keduanya menjadi negara demokrasi liberal yang makmur dan sekutu utama Amerika Serikat. Hubungan diplomatik antara Australia dan Jepang dituang dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada bulan Maret 2006, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Aso mendeklarasikan "kemitraan" antara

Australia dan Jepang, berdasarkan pada "nilai-nilai demokrasi bersama, saling menghormati, persahabatan yang mendalam, dan pandangan strategis bersama", untuk menjadi "lebih kuat dari sebelumnya" (Satake, 2015).

Australia memiliki banyak tujuan dan kepentingan di kawasan Asia, sehingga memerlukan banyak rencana dan strategi untuk menjalankannya, salah satunya dengan menjalin Kerjasama dengan negara-negara di Asia. Seperti Jepang, Australia dan Jepang telah berhasil dalam menjalin mitra ekonomi yang signifikan di kawasan Asia Timur dan membuat Hubungan ekonomi Australia dan Jepang telah berkembang atas dasar kepentingan pelengkap yang kuat dan kerja sama dalam berbagai bidang. Australia dan Jepang bahkan telah memiliki perjanjian kemitraan Ekonomi, yaitu Australia–Jepang lainnya ialah JAEPA (*Japan – Australia Economic Partnership Agreement*) yang mulai berlaku pada 15 Januari 2015. JAEPA akan memperkuat perdagangan antara dua negara ekonomi terbesar di Asia-Pasifik dengan memberikan eksportir, importir, investor dan produsen. Perjanjian inovatif ini akan secara signifikan meningkatkan akses ke ekonomi terbesar ketiga di dunia untuk bisnis Australia. JAEPA telah membantu menghasilkan minat baru dan ekspor penjualan untuk berbagai produk. Pada Oktober 2018, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Jepang bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Australia di Sydney untuk menguatkan hubungan bilateralnya. Bersama Amerika Serikat, Australia dan Jepang berusaha membentuk kelompok segitiga untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan meningkatkan investasi di dua kawasan yaitu Samudra Hindia dan

Asia Pasifik demi melawan perkembangan ekonomi dan pengaruh China di kawasan (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2018).

Kerjasama Australia-Jepang tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga terdapat pada bidang keamanan dan pertahanan. Pada Maret 2007, Jepang dan Australia telah menandatangani perjanjian Kerjasama oleh PM Australia, John Howard dan menteri pertahanan Jepang, Fumio Kyuma menyepakati hal itu dalam sebuah pertemuan di Tokyo. Hal ini ditunjukkan dengan diadakannya pertemuan puncak bilateral, konsultasi menteri luar negeri dan menteri pertahanan, atau "dua plus-dua" pertemuan, serta kesimpulan dan ratifikasi Perjanjian Akuisisi dan Lintas-Layanan (ACSA) dan Perjanjian Pertahanan Informasi (ISA). Kesepakatannya menyangkut ditingkatkannya kerjasama dalam pengamanan perdamaian, tindakan anti-terror serta bantuan bencana dan setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut membuat kerjasama Jepang dan Australia berkembang pesat (D.W, 2007). Selain kunjungan yang frekuentif antara Jepang dan Australia, dua negara ini juga telah mengadakan latihan militer reguler untuk mengembangkan interoperabilitas antara *Japan Self Defense Force* (JSDF) dan *Australian Defense Force* (ADF) pada tahun 2014 dan Jepang sebelumnya juga membeli dari Australia sejumlah peralatan pertahanan termasuk kendaraan lapis baja infanteri Bushmaster. Hal ini dilakukan agar dapat menjalankan operasi militer bersama, lebih banyak latihan militer bersama dan juga

seiring waktu ingin melihat lebih banyak kerjasama penting di bidang intelijen. Di waktu yang sama Jepang dan Australia juga mengumumkan kesepakatan perdagangan bebas, yang tentunya kesepakatan ini mengejutkan masyarakat dunia karena Jepang dikenal dengan negara yang melindungi pasarnya. Dengan Kerjasama yang telah dilakukan oleh Jepang dan Australia Sehingga antara Jepang dan Australia sudah ada kerjasama tingkat tinggi di bidang pertahanan, yang memberikan kepercayaan diri Jepang yang bersengketa dengan China perihal wilayah territorial (Antara News , 2014).

Kepentingan Jepang dalam Kerjasama pertahanan dengan Australia

Munculnya China sebagai kekuatan global baru menjadi perhatian serius AS dan sekutu-sekutunya di Asia Pasifik dan Eropa. Banyak pihak yang melihat para pemimpin China berusaha menggunakan pengaruh ekonomi dan politik untuk menghalangi dan menghambat pergerakan AS di Asia sebagai upaya menggantikan posisi AS di wilayah Asia dan memainkan peran lebih lanjut di level global. Pandangan seperti ini tampaknya sangat berpengaruh pada para pembuat keputusan di AS. Sikap curiga terhadap munculnya China ini telah mendorong AS untuk mengundang partner-partner aliansinya, terutama Jepang dan Australia, untuk melakukan strategi Containment.

Namun tidak hanya itu saja, ancaman nuklir yang diberikan oleh Korea Utara juga membuat Jepang merasa terancam keamanan nasionalnya karena adanya percobaan nuklir Korea Utara yang melewati batas negaranya membuat penduduk Jepang khawatir dan merasa trauma karena kejadian pada masa lalu yaitu pengeboman Hiroshima dan

Nagasaki.

China dalam kerjasama Jepang-Australia

Asia Pasifik merupakan kawasan yang mempertemukan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan bahkan new emerging superpower, China. Asia Pasifik diposisikan sebagai “hub” dari interaksi negara-negara tersebut maupun dengan negara-negara lain berada di kawasan tersebut baik secara bilateral maupun multilateral. China melihat bahwa dalam konteks kekuatan maritim, AS telah mendominasi wilayah Pasifik dalam beberapa dasawarsa terakhir. Bagi China, dominasi kekuatan maritim AS di Pasifik membatasi keleluasaan dalam ruang gerak dalam rangka meningkatkan kembali eksistensi negaranya dalam bidang ekonomi, politik dan militer. Kekuatan maritim China didukung pula oleh kepemilikan kapal selam nuklir, dimana China telah memiliki kapal selam kelas Jin dan Kelas Shang yang masuk dalam jajaran PLAN sejak tahun 2000an. Keberadaan kapal selam nuklir yang ditempatkan pada armada Selatan merupakan sebuah sinyal akan upaya dari China untuk melakukan dominasi terhadap wilayah maritim pada kawasan tersebut yang terkait dengan permasalahan konflik wilayah di Laut China Selatan (Rachmat, 2017). Hal tersebut membuat China di bawah kepemimpinan Presiden Hu Jintao mengeluarkan kebijakan dalam rangka merevisi misi dari *People Liberation Army* (PLA) dalam rangka meningkatkan kepentingan strategis China dalam ruang lingkup global dan mengawal kekuasaan partai

(partai komunis China), menjamin keamanan perkembangan ekonomi nasional, dan kedaulatan territorial. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka China memerlukan kekuatan maritim yang akan diperoleh melalui modernisasi PLA Navy, khususnya untuk membuka pembatas ruang gerak yakni kekuatan maritim AS yang berada di Pasifik. Peningkatan kapabilitas militer China tidak dapat dilepaskan dari peningkatan cepat Gross National Product (GNP) yang membuat China dengan mudah mengembangkan kekuatan militer dalam beberapa tahun terakhir (Zahra, 2022).

China jelas ingin memperluas militernya dan memperkuat penegakan hukum maritim di kawasan Asia-Pasifik. Memblokir kapal negara lain digunakan sebagai mekanisme strategis, dan membesar-besarkan tindakan balasan mereka adalah taktik China untuk mencegah negara lain merespons lebih dari kekerasan. Ada harapan bagi China untuk berbagi dan mematuhi norma-norma internasional, dan memainkan peran yang lebih aktif dan kooperatif untuk masalah-masalah regional dan global. kemampuan militer China di berbagai bidang berkembang pesat dengan anggaran militer yang terus meningkat tanpa transparansi yang memadai. Selain itu, China telah mengambil langkah-langkah yang dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah secara paksa tatanan hukum internasional yang berlaku berdasarkan kesaksiannya sendiri di laut dan di udara, termasuk di Laut China Timur dan Laut China Selatan. China telah memperluas dan mengintensifkan aktivitas maritim dan udaranya di wilayah sekitar Jepang, termasuk perairan dan wilayah udara di sekitar Kepulauan Senkaku. China telah

menunjukkan tindakan yang tampaknya melanggar kebebasan terbang di laut lepas dengan membangun zona deteksi pertahanan udara di Laut China Timur. Sikap asing dan tindakan militer China tersebut, serta kurangnya transparansi dalam kebijakan militer dan keamanan, telah menjadi masalah bagi masyarakat internasional, termasuk Jepang. Itulah sebabnya pemerintah Jepang harus memperhatikan situasi ini. Hal ini disebabkan keinginan Cina untuk menguasai kawasan Laut Cina Selatan yang terletak di kawasan Asia-Pasifik. Ketegangan antar negara akibat sengketa Laut China Selatan menghadirkan ancaman nyata bagi kawasan Asia-Pasifik karena pembangunan militer China memperpanjang konflik dan dapat memicu perang.

Strategi Rebalancing AS di Asia dalam kerjasama Jepang-Australia

Perilaku Amerika Serikat dalam melakukan strategi balancing melalui kebijakan Rebalancing karena adanya rasa tidak nyaman akibat adanya peningkatan kapabilitas yang sedang dialami oleh China dalam beberapa waktu terakhir, walaupun pada kenyataannya China masih jauh dalam upaya mempersempit jarak kekuatannya dengan AS dan masih dibutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan kesiapan serta kemandirian dari segala aspek sumber daya. Hal yang dapat menjadikan China menjadi ancaman dapat dibuktikan melalui perhitungan dan perimbangan kekuatan yang sesungguhnya, yaitu *aggregate power*, *geographical proximity*, *offensive power*, dan

aggressive intentions. Pembuktian tersebut diproyeksikan dengan adanya penguatan aliansi militer AS di Kawasan Asia-Pasifik melalui upaya rebalancing, yang salah satunya adalah strengthening alliance. Upaya tersebut memberikan AS pilihan strategi yaitu balancing dan/atau bandwagoning. Respon AS atas adanya peningkatan atau China Rise merujuk pada upaya strategi balancing dengan dibentuknya aliansi militer AS dalam rangka menghadapi dinamika di kawasan atas pertimbangan strong states vs weak states, availability of alliance, serta peace and war condition sesuai dengan teori Balance of Threat. Meskipun China cukup diperhitungkan, namun jika disejajarkan dengan AS, maka akan terlihat perbedaan bentuk interaksi antara AS sebagai strong states dengan China sebagai middle-weak states. Selain itu, ability of alliance dapat dilihat pada jumlah negara aliansi AS, serta kedekatan antar-negara aliansi yang cukup berdekatan dan dapat menjangkau dalam waktu cepat. Kedua pertimbangan tersebut sekaligus menguatkan pilihan AS untuk melakukan re-balancing dalam menghadapi potensi ancaman yang muncul. Pertimbangan peace condition justru turut menjadi pendukung untuk lebih melakukan penguatan aliansi, dibandingkan melakukan aksi yang agresif atas munculnya potensi ancaman dari China. (Planifolia, 2017).

Amerika Serikat membutuhkan struktur kekuasaan dimana negara berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menciptakan peluang untuk memajukan kepentingan nasionalnya dengan menggabungkan kekuatannya dengan negara lain yang memiliki kepentingan yang sama. Model aliansi adalah keputusan untuk mengubah atau mempertahankan keseimbangan lokal, regional atau global. Tindakan seperti itu

biasanya diikuti oleh negara lain dengan tindakan serupa. Dalam hal ini, sekutu Asia Amerika Serikat adalah Jepang. Pembagian beban yang lebih seimbang telah lama menjadi tuntutan AS dari Jepang. Sementara pemerintahan Obama mengejar strategi kompromi di bidang militernya, Jepang berusaha meyakinkan Amerika Serikat bahwa mereka adalah sekutu utama dan mampu memenuhi tuntutan Amerika. Hal ini penting karena Jepang mengkhawatirkan melemahnya komitmen Amerika terhadap keamanan Jepang akibat menguatnya hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan China. Beban yang lebih seimbang antara kedua negara sekutu, Amerika Serikat dan Jepang, akan sangat mempengaruhi bagaimana Jepang dan Amerika Serikat menangani Laut Cina Timur dan masalah lain yang menjadi perhatian bersama. (Kuswaya, 2021). Pembagian beban yang lebih seimbang telah sejak lama menjadi tuntutan AS terhadap Jepang. Meskipun pemerintahan Obama menjalankan strategi rebalancing di kawasan militernya, Jepang berusaha meyakinkan AS bahwa mereka merupakan sekutu penting dan mampu merespons tuntutan AS. Hal ini menjadi penting mengingat Jepang memiliki kekhawatiran akan melemahnya komitmen AS terhadap keamanan Jepang akibat adanya peningkatan hubungan ekonomi AS-China. Beban yang lebih seimbang di antara dua negara sekutu ini, AS-Jepang, akan sangat mempengaruhi perimbangan bagaimana Jepang dan AS akan mengelola persoalan Laut China Timur dan persoalan lainnya yang menyangkut kepentingan kedua

negara.

Nuklir Korea Utara dalam Kerjasama Jepang dengan Australia

Korea Utara memutuskan untuk mulai mengembangkan senjata nuklir sendiri sejak tahun 1950an. Korea Utara memperoleh fasilitas nuklir pertama kali dari Uni Soviet pada tahun 1965. Namun sebagai negara yang agresif dalam urusan militer membuat Korea Utara memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan negara-negara di Asia Timur khususnya negara tetangga seperti Jepang. Pada tahun 2006 Korea Utara secara resmi menarik diri dari rezim *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang membuat Korea Utara secara terang-terangan melakukan uji coba nuklirnya, dengan itu Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir secara besar-besaran dan hal tersebut dilakukan secara intensif. Pengembangan senjata nuklir ini membuat Jepang yang notabene merupakan negara tetangga merasa terancam karena beberapa kali uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara dapat menjangkau wilayah Jepang. Salah satu rudal yang menjangkau Jepang adalah uji coba yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2016 lalu yang melewati wilayah Okinawa bagian selatan. Alih alih sebagai proteksi diri dari ancaman hegemoni adanya nuklir ini malah menjadi ancaman stabilitas keamanan di kawasan, Jepang yang secara geografis nya berdekatan dengan Korea Utara ini harus mewanti-wanti kapan dan secara tiba tiba Korea Utara kembali meluncurkan uji coba rudal nuklir nya yang mana tentu saja ini akan mengancam keamanan serta membahayakan penduduk Jepang (Kompas.com , 2022).

Korea Utara telah memberikan implikasi ancaman terhadap keamanan Jepang secara langsung, terbukti dengan adanya jaringan terlarang diwilayah yurisdiksi Jepang yang mendukung program proliferasi tersebut dan juga secara tidak langsung, yaitu kapasitas kekuatan nuklir Korea Utara yang dapat sewaktu-waktu mengancam keselamatan warga Jepang dan wilayah teritorial Jepang. Jepang memberkan respon penolakan terhadap hal tersebut. Tindakan penolakan Jepang terbentuk karena adanya sebuah pondasi yang mendasarinya, yaitu identitas. Identitas tersebut terbentuk dipengaruhi oleh norma (fungsi konstitutif norma) dalam hal ini masuk ke dalam *Personal Identity* yang berkaitan dengan Kedaulatan Jepang sebagai “Negara Non-Nuklir”. Sebagai negara yang berdaulat, Jepang memiliki kesadaran untuk melindungi warga negaranya pasca pemboman nuklir Hiroshima dan Nagasaki, usaha tersebut harus dihormati dan dan dihargai oleh negara lain sebab Jepang merupakan negara yang berdaulat. Bentuk usaha Jepang melindungi warga negaranya dari ancaman perang dan nuklir adalah dengan memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan perdamaian dalam bidang pengadaaan dan pengembangan teknologi, bukan terlibat dalam proliferasi nuklir. Secara domestik, Jepang memiliki kebijakan otonom terkait nuklir, sedangkan sebagai bagian dari subjek internasional Jepang menunjukkan komitmen domestiknya dengan bergabung kedalam NPT. Keluarnya Korea Utara dari NPT dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan domestik Korea Utara, namun hal tersebut memberikan ancaman

terhadap identitas personal Jepang, ketika program proliferasi tersebut memberikan ancaman fisik secara langsung di wilayah Jepang yang dapat membahayakan warga negara Jepang dan wilayah Jepang (Hutapea, 2018). Nuklir Korea Utara membuat Jepang merasa semakin terancam keamanannya nasionalnya karena beberapa kali percobaan nuklir Korea Utara yang melewati batas negaranya membuat penduduk Jepang khawatir dan merasa trauma karena kejadian pada masa lalu yaitu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki.

KESIMPULAN

Perubahan dalam dinamika keamanan Jepang setelah Perang Dingin mendorong Jepang untuk mengubah secara fundamental dan struktural dalam strategi, terlebih lagi Amerika Serikat yang menjadi sekutu Jepang ikut andil dalam pengambilan keputusan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang. Dengan mengambil langkah awal pembuatan NDPO (National Defense Program Outline) pada tahun 1996 sebagai kebijakan pertahanan Jepang pasca perang dingin, NDPO 1996 ini memiliki peran pertahanan Jepang di kawasan pasca Perang Dingin, yang juga berisi tentang kerjasama Jepang dan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman seperti kemungkinan adanya aktivitas agresi militer, baik terhadap Jepang maupun negara lain di luar negara Jepang yang dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan. Dari tahun ke tahun dunia semakin menunjukkan sifat konteks politik internasional yang awalnya berpola bipolar menjadi unipolar dan justru menjadi multipolar seperti sekarang. Dunia yang multipolar menciptakan dunia dalam kekacauan yang sulit terdeteksi dimana letak persaingan kekuatan – kekuatan terbesar antar negara oleh karena itu memunculkan kekhawatiran bagi Jepang karena ancaman bisa datang

kapan saja, selain itu pengaruh China di kawasan merupakan salah satu faktor Jepang memperkuat eksistensinya melalui hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Australia.

Jepang telah lama menjalin hubungan kerjasama dengan Australia dengan memiliki tujuan yang sama memperkuat eksistensinya di Asia Pasifik menjadikan Jepang dan Australia kerap terlibat kerjasama baik secara militer maupun perekonomian. Kedua negara ini juga telah mengadakan latihan militer reguler untuk mengembangkan interoperabilitas antara *Japan Self Defense Force (JSDF)* dan *Australian Defense Force (ADF)* pada tahun 2014 dan Jepang sebelumnya juga membeli dari Australia sejumlah peralatan pertahanan termasuk kendaraan lapis baja infanteri Bushmaster. Hal ini dilakukan agar dapat menjalankan operasi militer bersama, lebih banyak latihan militer bersama dan juga seiring waktu ingin melihat lebih banyak kerjasama penting di bidang intelijen. Gempuran penguatan pertahanan keamanan Jepang tidak lepas dari ancaman nuklir Korea Utara yang saat ini tengah gencar melakukan uji coba nuklir yang kerap kali melewati batas wilayah Jepang dan membuat kekhawatiran bagi negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. (2015, Juni 26). *Multilateral Diplomacy dan Bilateral Diplomacy . politik .*
- Amril, O. (2005). Pasukan bela (Self Defense Force) dan masalah pertahanan Jepang : analisa kebijakan pertahanan nasional Jepang. *Universitas Indonesia. Program Pascasarjana.*
- Antara News . (2014, April 8). Australia buat kesepakatan pertahanan dengan Jepang.

- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2018). JAEPA Outcomes at a Glance.
- D.W. (2007, Maret 13). Dialog Keamanan Jepang.
- H, A. F. (2014). Evaluasi Hubungan Jepang-Amerika Serikat Dari Segi Militer . *Skripsi Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unuversitas Hasanuddin* .
- Hutapea, R. U. (2018, Agustus 28). Jepang: Korea Utara Masih Tetap Jadi Ancaman Serius.
- Irawan, H., Rizki, K., & Zulkarnain. (2021). Kebijakan Pertahanan Jepang Terhadap Keterlibatan Self Defense Force (SDF) Dalam United Nations Peacekeeping Operations (UN-PKO). *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*.
- Kompas.com . (2022, 10 4). Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik ke Jepang, Penduduk Diminta Berlindung.
- Kompas.com. (2022, September 28). Uji Coba Bom Nuklir Korea Utara, Dunia Tahan Napas. *Global*.
- Kuswaya, N. C. (2021, Mei 5). Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat sebagai Kebijakan Strategi Pertahanan Jepang dalam Memperkuat Kepentingannya di Kawasan Asia Timur.
- Mahesa, W. (2019). Faktor Domestik dan Sistemik Dari Perluasan Peran Militer Jepang Tahun 2014. *Departemen Hubungan Internasional Fisip, Universitas Airlangga*.
- Media Indonesia. (2018, Januari 19). Jepang Kerja Sama Pertahanan dengan Australia. *Administratoi, Internasional* .
- Ministry Of Defense . (2016).
- Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani. (2015). Perubahan kebijakan pertahanan Jepang pasca perang dingin = The change of Japan's defense policy after cold war. *Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Planifolia, V. (2017). Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1).
- Prayuda, R., & Sundari , R. (2020). Diplomasi dan POver: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies* .
- Rachmat, A. N. (2017). Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik Dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 2(131).
- Rana, K. S. (2020). Bilateral Diplomacy : A Practitioner Prespective. *Diplo*.
- Satake, T. (2015, May). Why a strong Australia-Japan relationship matters. *News*.
- Zahra, A. A. (2022, November 21). Modernisasi Militer China: Ambisi atau Gengsi?